

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdul Qadim Zallum, *Demokrasi sistem kufur*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2009

Affan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2006

Bagir Manan, *Dasar Perundang-undangan Indonesia*, Jakarta: Ind-Hill-Co, 1992

Drs. Miftah Thoha, *Perspektif Perilaku Birokrasi*, Jakarta: Rajawali Pers 1991

Hardjito, Dydiet, *Teori Organisasi dan Tehnik Pengorganisasian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2000 Muhammad Ichsan, *Ayat dan Hadist Ahkam*, Yogyakarta; Gramasurya, 2012

Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Daru rat*, Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada, 2007

Merphin Panjaitan, *Gerakan Waeganegara Menuju Demokrasi*, Jakarta: Restu Agung, 2001

Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010

Miriam Budiarto, *Dasar dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2008

Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Widya Sarana , 1992

Soehino, *Hukum Tata Negara: Teknik Perundang-undangan*, Yogyakarta: Liberty, 1990

Septi Nur Wijayanti & Iwan Satriawan, *Hukum Tata Negara (Teori & Prakteknya di Indonesia)*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta bekerjasama dengan Divisi Publikasi & Penerbitan LP3M UMY, 2009

Undang-Undang :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Jurnal :

Dian Kus Pratiwi (2017) .“Implikasi Yuridis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Ormas Kemasyarakatan Di

Indoensia.” *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Padjajaran* Vol. 2 No.23
Juli 2017 hlm 121

Fatir Hasibuan (2014), “Materi Muatan Perundang-Undangan.” *Jurnal Negri
Indonesia*. Vol. 4 No. 2 Mei 2014, hlm 76-77

Hartuti Purnaweni (2015) , “Demokrasi Indonesia dari Masa ke Masa”. *Jurnal
Hukum Universitas Padjajaran*, Vol.1 No 3 2015, hlm 119-121

John FereJohn dan Paquale Paquino (2004). “The Law of The Exception: A
Typology of Emergency Powers”. *International Journal of
Constitutional Law* Vol.2, No. 2 2004, hlm 223- 225

Ni'Matul Huda (2011), "Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Oleh Mahkamah Konstitusi (Studi terhadap Perppu No. 4
Tahun 2009 dan Perppu No.4 Tahun 2008)", *Jurnal Media Hukum*, Vol.
18, No. 2, hlm 219

Palupi Annisa Auliani (2017) ,“Perppu Ormas dan Lika-Liku Perppu di
Indonesia,” *Jurnal Nasional Kompas*. Vol. 6,No.3 Juli 2017 Hlm 32

Pratiwi Pujiastuti (2017) , “Analisis Perppu Ormas dan Demokrasi di Indonsia”,
E-jurnal.com, Vol.5 No.10 2017 Hlm 123-124

Putra Simbolon (2015), “Demokrasi dan Undang-Undang di Indonesia”, *Jurnal
UNTAG Semarang*. Vol.23 No.6 Mei 2015 Hlm 226

Rilis Pers (2017) Bersama Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Perppu Ormas,
“Perppu Ormas Ancaman Bagi Demokrasi dan Negara Hukum”. *Pusat
Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia*. Vol. 11 No.9 Juli 2017 hlm 165-
167

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Ormas (2017) ,“Perppu Ormas Ancaman Bagi
Demokrasi dan Negara Hukum”. *Pusat Studi Hukum & Kebijakan
Indonesia (PSHK)* Vol.2 No.3 Juli 2017 hlm 56-57

Syaprin Zahidi (2013), UU Ormas Dalam Perspektif Ham, dalam jurnal *Repository Universitas Muhammadiyah Malang*. Vol.12 No.6 April 2013 Hlm 18-19

Victor Imanuel W.Nalle (2017). “Asas Contrarius Actus pada Perppu Ormas: Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara dan Hak Asasi Manusia”.. *Jurnal Hukum Universitas Padjajaran* Vol.4 No. 2 hlm 115-116

Skripsi:

Muhammad Tang (2018), “Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan”. *Repository Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*
<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/17344/E.%20BAB%20I.pdf?sequence=5&isAllowed=y> di akses pada 3 Maret 2018

Internet :

Setyo Budi, *Problematika Penerbitan Lika-liku Ormas dan Liku-Liku Perppu Di Indonesia*
https://www.kompasiana.com/ekapadma25/problematikapenerbitan-perppu-ormas-dan-likalikuperppudiindonesia_5970adb94fc4aa4bcd62b6c2 diakses pada 23 Desember 2017

Syairul Alim, Menyoal Pemberlakuan UU Ormas
<https://indonesiana.tempo.co/read/118577/2017/10/31/enterprise.mobile/menyoal-pemberlakuan-uu-ormas> diakses pada 12 Januari 2018

Rahman Putra, *Pemerintah Siap Hadapi Gugatan Ormas*
<http://news.liputan6.com/read/3150957/pemerintah-siap-hadapi-gugatan-ormas> diakses pada 25 Desember 2017